

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik harus selalu melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah selalu mengatur semua aspek teknis yang mencakup diantaranya bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SAP 2010) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki 4 kriteria yang terdiri dari relevan, dapat dipahami, andal, dan dapat dibandingkan. Berdasarkan kriteria tersebut pelaporan keuangan dapat diketahui melalui informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan secara yakin dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan pada sebuah informasi yang telah dipersiapkan secara baik, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas, serta disetujui dan diaudit secara transparan.

Dalam melaksanakan proses akuntansi keuangan Pemerintah Daerah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Badan Pemeriksa Keuangan akan memberikan laporan hasil pemeriksaan yang berupa opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit. Kualitas pengelola keuangan daerah secara langsung dapat dilihat

dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang secara umum kualitas informasi laporan keuangan daerah masih belum maksimal atau lemah.

Menurut Warisno (2009) dalam menyelenggarakan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu mempunyai sebuah sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, selalu mengikuti pelatihan, dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan. Sumber daya manusia tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Dengan itu, laporan keuangan yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula di entitas pemerintahan, laporan keuangan daerah akan menghasilkan sebuah laporan yang berkualitas jika membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan akuntansi pemerintahan keuangan daerah yang dapat dipahami.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), Kurniawan (2019), Harlinda (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Yeny dkk (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah karena sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan belum mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.

Di samping itu, pentingnya perangkat pendukung dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang berbasis teknologi membuat

pengelolaan data lebih cepat, efisien, dan efektif. Saat ini, pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sangat membantu dengan mendapatkan sebuah informasi mengenai keuangan daerah yang dapat dikelola, diakses, dan didayagunakan berbagai pihak masyarakat. Selain itu, apabila belum mengerti sistem akuntansi keuangan, maka belum mengerti dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan pada dasarnya memperoleh hasil keluaran laporan keuangan yang berupa informasi.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2015) dan Lisda et al., (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Riandani (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena masih terdapat beberapa peralatan dan software yang mendukung rusak dan usang tidak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya sehingga menimbulkan beberapa hambatan bagi aparatur penyusun laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian Ihsanti (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, peran auditor internal dalam memberikan jaminan laporan keuangan yang berkualitas harus melakukan proses pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adanya peran auditor internal ini bisa membantu

pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Dalam hal ini peran auditor internal yaitu memberikan jaminan mutu terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah (Diani, 2014).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014), Sari (2014) menunjukkan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2016) menunjukkan bahwa peran auditor internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena internal audit dalam bekerja belum maksimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian intern (SPI) yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kelemahan yang dimiliki sistem pengendalian intern menyebabkan kurangnya keandalan pada laporan keuangan, karena masih ada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan meningkatnya biaya dan potensi pendapatan yang hilang. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dapat meningkatkan sebuah laporan keuangan yang semua sistem dan prosedur akuntansi dalam menyusun laporan keuangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Harlinda (2016), Trisnawati & Wiratmaja (2018), Chodijah & Hidayah (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena indikator yang digunakan belum mampu menjadikan sistem pengendalian intern menjadi sebuah variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Pati Tahun 2015 – 2017 Laporan Keuangan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 dari BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang ditemukan BPK terjadi karena pencatatan uang jaminan dan pengelolaan remunerasi yang belum memadai. www.bpk.go.id diakses 2017.

Meskipun BPK masih menemukan adanya kelemahan data penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun setidaknya penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati semakin membaik. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan laporan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. www.bpk.go.id diakses 2017.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lasmara & Rahayu (2016) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, peran pendukung dan peran auditor internal kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dari penelitian diatas yaitu dengan menambah variabel sistem pengendalian internal, dimana sistem pengendalian intern ini masih memiliki kelemahan dalam laporan keuangan yang hasilnya kurang handal dan kurang relevan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Maka penulis mengambil judul “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Keuangan, Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Otoritas Daerah Kabupaten Pati)”.

1.2 Rumusan Masalah

Kurangnya kompetensi sumber daya manusia menjadi hambatan teknis bagi mereka dalam memahami sistem akuntansi. Selain itu perangkat pendukung yang memudahkan aparatur dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintah yang berbasis teknologi menjadikan salah satu alat untuk sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah supaya efisiensi dan efektivitas ketepatan waktu tercapai. Serta fungsi auditor internal yang sebagai peran aparat pengawasan internal pemerintah belum efektif dalam menciptakan sistem peringatan dini. Dan juga sistem pengendalian intern yang masih lemah dalam menghasilkan laporan keuangan yang kurang handal dan kurang relevan dalam pengambilan keputusan. Standar laporan keuangan yang baik harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan informasi tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini diantaranya :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ?
4. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ?
5. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
2. Mengetahui dan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
3. Mengetahui dan menganalisis sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
4. Mengetahui dan menganalisis peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas manfaat yang dapat diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wawasan dan referensi teori yang diperoleh dalam mengembangkan ilmu akuntansi keuangan daerah.
 - b. Sebagai referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukkan kepada pihak yang bersangkutan dan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan yang mengenai kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan.

- b. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat bukti empiris dan dijadikan perbandingan, pengembangan, dan penyempurnaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.